

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, M. Faathir. (2017). Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit, Dan Tindak Lanjut Hasil Audit Terhadap Persepsi Korupsi Pada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Jember. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jember.
- Ali, S. (2018). Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan, Kinerja Keuangan, dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Korupsi Kepala Daerah di Indonesia. Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>. Diakses pada tanggal 13 Agustus 2020.
- Anthos, S. R. R. (2018). Pengaruh Opini Audit Dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah Di Indonesia Indonesia (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Periode 2012-2015). (Abstrak). Program Studi Akuntansi Universitas Andalas Padang.
- Azhar, K., & Setyaningrum, D. (2019). The Effect of Audit Findings and Follow up of Audit Recommendation on Corruption of Ministries / Institutions in Indonesia. (Abstrak). Departement of Accounting University of Indonesia.
- Banyubiru, B. G. (2019). Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia Pada Tahun 2016. Tugas Akhir. Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yogyakarta. Hal: 11–15.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Ghozali, I., Latan H. 2015. Partial Least Squares Konsep, Teknik, Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0 Untuk Penelitian Empiris. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Guntara, Bima. 2020. Maraknya Korupsi Di Pemerintahan Daerah Dalam Era Desentralisasi. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 12 No. 1
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. 2012. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Haryono, U. 2012. Pengawasan Untuk Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Akuntansi & Auditing*. Vol 8.2
- Heriningsih, S. (2013). Pengaruh Opini Audit Dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Pulau Jawa). *Buletin Ekonomi*, 11(1), 1–86.
- Huse, Morten. 2007. "Boards, Governance and Value Creation: The Human Side of Corporate Governance". *Cambridge University Press Vol 11, Issue 4*, Hal. 439-444.
- Husna, N., Rahayu, S., & Triyanto, D. N. (2017). Pengaruh Opini Audit Dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Korupsi (Studi Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia Tahun 2016) The Influence Of Audit Opinion And Audit Findings

On The Level Of (Study On Local Governments In Indonesia 2016), 4(2), 1637–1642.

<https://aclc.kpk.go.id/materi/berpikir-kritis-terhadap-korupsi/infografis/3-strategi-pemberantasan-korupsi>. Diakses pada tanggal 12 Agustus 2020.

<http://www.bpkp.go.id/puslitbangwas/konten/2674/16.050-Faktor-Faktor-Penyebab-Kepala-Daerah-Korupsi>. Diakses pada tanggal 21 Januari 2021.

Indonesia Corruption Watch. 2015. Tren Penindakan Kasus Korupsi 2015. <https://www.antikorupsi.org/id/article/tren-penindakan-kasus-korupsi-2015>. Diakses dan Didownload pada tanggal 30 Oktober 2020.

_____. 2016. Tren Penindakan Kasus Korupsi 2016. <https://www.antikorupsi.org/id/article/tren-penindakan-kasus-korupsi-2016>. Diakses dan Didownload pada tanggal 30 Oktober 2020.

_____. 2017. Tren Penindakan Kasus Korupsi 2017. <https://www.antikorupsi.org/id/article/tren-penindakan-kasus-korupsi-2017>. Diakses dan Didownload pada tanggal 30 Oktober 2020.

_____. 2018. Tren Penindakan Kasus Korupsi 2018. <https://www.antikorupsi.org/id/article/tren-penindakan-kasus-korupsi-2018>. Diakses dan Didownload pada tanggal 30 Oktober 2020.

_____. 2019. Tren Penindakan Kasus Korupsi 2019. <https://www.antikorupsi.org/id/article/tren-penindakan-kasus-korupsi-2019>. Diakses dan Didownload pada tanggal 30 Oktober 2020.

Jatim.bpk.go.id. Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. <https://jatim.bpk.go.id/hasil-pemeriksaan-laporan-keuangan-pemerintah-daerah/>. Diakses pada tanggal 14 Juli 2020.

Jatimprov.go.id. 2015. Kabupaten/Kota Jawa Timur. <http://jatimprov.go.id/read/profil/kabupaten-kota>. Diakses pada tanggal 18 Agustus 2020.

Jensen, M. C., & Meckling, W. H., 1976. Teori Perusahaan: Perilaku Manajerial, Biaya Agensi dan Struktur Kepemilikan. *Jurnal Ekonomi Keuangan*. 3 (4): 305-360.

Klitgaard, Robert. 2001. "*Membasmi Korupsi*". Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Kpk.go.id. 2020. Tiga Strategi Mencegah Korupsi. <https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/1482-tiga-strategi-mencegah-korupsi>. Diakses pada tanggal 12 Agustus 2020.

Liu, J., & Lin, B. (2012). Government auditing and corruption control : Evidence from China ' s provincial panel data. *China Journal of Accounting Research*, 5(2), 163–186. <https://doi.org/10.1016/j.cjar.2012.01.002>

Merdeka.com. 2018. Data 2004-2018: 104 Kepala Daerah Tersandung Korupsi, Paling Banyak di Jawa Timur.

<https://www.merdeka.com/peristiwa/data-2004-2018-104-kepala-daerah-tersandung-korupsi-paling-banyak-di-jawa-timur.html>. Diakses pada tanggal 14 Oktober 2020.

Nasional.kompas.com. 2018. Dalam 2 Tahun 11 Kepala Daerah di Jatim jadi Tersangka Kasus Korupsi.
<https://nasional.kompas.com/read/2018/10/10/05283531/dalam-2-tahun-11-kepala-daerah-di-jatim-jadi-tersangka-kasus-korupsi?page=all>. Diakses pada tanggal 14 Juli 2020.

News.detik.com. 2018. Tujuh Kepala Daerah di Jawa Timur Terjerat KPK.
<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4361830/tujuh-kepala-daerah-di-jawa-timur-terjerat-kpk>. Diakses pada tanggal 14 Juli 2020.

Pradiptyo, Rimawan. (2016). Dampak Sosiasl Korupsi. Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat.
<https://acch.kpk.go.id/images/tema/litbang/modul-integritas/Modul-3-Dampak-Sosial-Korupsi.pdf>. Diakses dan didownload pada tanggal 26 Oktober 2020.

Pramesti, L., & Haryanto. (2019). Akuntabilitas dan Tingkat Korupsi Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Akuntabilitas dan Tingkat Korupsi Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Provinsi. *Jurnal Akuntansi Aktual*, <https://doi.org/10.17977/um004v6i22019p298>

Pratama, R. A., & Faisal. (2016). Pengaruh Hasil Pemeriksaan BPK, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Nilai Indeks Persepsi Korupsi Pemerintah Daerah. 5, 1–14.

Putri, D. I. (2019). Hasil Audit Pemerintah Dan Tingkat Korupsi Kolusi Pada Pemerintah Daerah Provinsi Di Indonesia. Skripsi. Jurusan Akuntansi Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

Ramadaniati, F. (2019). Pengaruh Opini Audit Dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Barat Periode 2015-2017). (Abstrak). Program Studi Akuntansi Universitas Andalas Padang.

Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara RI Tahun 2003, No. 47. Sekretariat Negara. Jakarta.

_____. 2004. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Audit. Lembaran Negara RI Tahun 2004, No. 4400. Sekretariat Negara. Jakarta.

_____. 2004. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2004, No. 125. Sekretariat Negara. Jakarta.

_____. 2004. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2004, No. 126. Sekretariat Negara. Jakarta.

_____. 2014. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Lembaran Negara RI Tahun 2014, No. 244. Sekretariat Negara. Jakarta.

Rini, R., & Damiati, L. (2018). Analisis Hasil Audit Pemerintahan dan Tingkat Korupsi Pemerintahan Analisis Hasil Audit Pemerintahan dan Tingkat Korupsi Pemerintahan Provinsi di Indonesia. <https://doi.org/10.24815/Jdab.V4i1.4933>

Riset.ti.or.id. 2015. *Corruption Perception Index* 2015. <https://riset.ti.or.id/corruption-perception-index-2015/>. Diakses pada tanggal 14 Oktober 2020

_____. 2016. *Corruption Perception Index* 2016. <https://riset.ti.or.id/corruption-perceptions-index-2016/>. Diakses pada tanggal 14 Oktober 2020

_____. 2017. *Corruption Perception Index* 2017. <https://riset.ti.or.id/corruption-perceptions-index-2017/>. Diakses pada tanggal 14 Oktober 2020

_____. 2018. *Corruption Perception Index* 2018. <https://riset.ti.or.id/cpi2018/>. Diakses pada tanggal 14 Oktober 2020

_____. 2019. *Corruption Perception Index* 2019. <https://ti.or.id/cpi-2019-korupsi-dan-pentingnya-integritas-politik/>. Diakses pada tanggal 14 Oktober 2020

Saputra, D. (2014). Analisis Kemandirian Dan Efektivitas Keuangan Daerah Pada Kabupaten Dan Kota Di Propinsi Sumatera Barat. Artikel Ilmiah. Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Padang.

Setiawan, W. (2012). Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Lkpd) Pemerintah Daerah Di Indonesia. Tugas Akhir. Jurusan Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang.

Shofiyah. 2019. Korupsi dan Kemiskinan dalam Bingkai Pancasila. *Jurnal Ilmu Al Quran dan Tafsir*, 2(2), 87-96.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Penerbit Alfabeta, Bandung

Suhardjanto, D. 2018. Accountability and Corruption Level of Provincial Government in Indonesia. *Review of Integrative Business and Economic Research*, 7(3), 281–296.

Umar, A. U. A. Al, & Savitri, A. S. N. (2019). Analisa Hasil Audit Pemerintah Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah Ahmad, 3(2), 103–117.

Wahyuni, N. (2004). Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Malang. Tugas Akhir. Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim Malang, 1–18.

Wakhyudi, dan Laila Firda Tarunasari. "Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Melalui Rasio Keuangan Daerah" . *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan* Vol. 1 No. 2, 2013 pg. 139-150. STIE Kesatuan ISSN 2337 – 7852

Wardahayati, Sarwani, & Hayat, A. (2019). Pengaruh opini audit, temuan audit, tindak lanjut audit, serta laporan penyelenggaraan pemerintah daerah

terhadap tingkat korupsi (studi pada pemerintah provinsi di Indonesia), 6014(vol 4 (2019) National Conference on ASBIS 2019), 314–335.

Wibowo, A & Rossieta, H.(2009). Faktor-faktor determinasi kualitas audit-suatu studi dengan pendekatan earning surprise benchmark. *Simposium Nasional Akuntansi XII*, Palembang, hal. 1-34.

Widodo Prasetyo Utomo, Nur Diana, A. (2018). Pengaruh Opini Auditor Badan Pemeriksa Keuangan Terhadap Tingkat Korupsi (Studi Pada Kementerian/Lembaga Di Indonesia), *E-JRA Vol.07(05)*, 85–96.

Wulandari, R. (2015). Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Lkpd) Dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah Di Indonesia. Skripsi. Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Zaky, Pengertian Korupsi Secara Umum, Menurut Para Ahli & Undang Undang, 2019.

<https://www.zonareferensi.com/pengertian-korupsi/>. Diakses pada tanggal 26 Oktober 2020.